

MAJALAH ILMIAH EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Volume 3 Nomor 1 Januari – Juni 2010

Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu; Sebuah Evaluasi
Handoko Hadiyanto

Efektivitas Program Pemp (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dan P4K
(Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil)
Mochammad Ridwan

Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Tertinggal Kabupaten Bengkulu Utara
(Studi Kasus di Kecamatan Napal Putih, Putri Hijau dan Ketahun)
Rossa Damayanti

Pendidikan Non Formal Solusi Untuk Meningkatkan SDM di Daerah Tertinggal
Kecamatan Kota Arga Makmur
Praningrum

Published Economy Faculty Ratu Samban University Arga Makmur

**MAJALAH ILMIAH
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Published by
Economy Faculty Ratu Samban University Arga Makmur

ISSN : 2085 – 5834

Pelindung : Rektor Universitas Ratu Samban

Pengarah : Purek I UNRAS
Purek II UNRAS

Penasehat : Dekan FE UNRAS

Penanggung Jawab : PD I FE UNRAS

Ketua Dewan Penyunting : Syahrudin Dent Labo

Sekretaris : Lusi Puspita

Bendahara : Yesi Sumarni

Editor : Soni BR
Dedi Lesmana
Nopan Omeri
Aleksander

Staf Umum : Okte Priani

Majalah Ekonomi dan Pembangunan terbit setiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester oleh Fakultas Ekonomi UNRAS.
Alamat Redaksi : Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Arga Makmur 38611

MAJALAH ILMIAH

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Volume 3 Nomor 1 Januari – Juni 2010

CONTENTS

- Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu; Sebuah Evaluasi 1 - 14
Handoko Hadiyanto
- Efektivitas Program Pemp (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dan P4K 15 - 38
(Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil)
Mochammad Ridwan
- Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya ALam di Desa Tertinggal Kabupaten Bengkulu Utara 39 - 70
(Studi Kasus di Kecamatan Napal Putih, Putri Hijau dan Ketahun)
Rossa Damayanti
- Pendidikan Non Formal Solusi Untuk Meningkatkan SDM di Daerah Tertinggal 71 - 94
Kecamatan Kota Arga Makmur
Praningrum

**PENDIDIKAN NON FORMAL
SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN SDM DI DAERAH TERTINGGAL
KECAMATAN KOTA ARGAMAKMUR**

Praningrum

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ratu Samban

Abstract

This research aimed looking for solution to raising up human resources quality in under developed villages. Type of this research is quantitative descriptive. The result shows in under developed villages in Argamakmur their population stand for more than half population did not finished their elementary school and much population did not school ever and blind letter. They become under developed one of such as reason is minim education infrastructure. So, they need non formal education which according with their need.

PENDAHULUAN

Fatah (2006) menyatakan esensi pendidikan adalah untuk mengembangkan sumberdaya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja manusianya dan sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dengan memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik maka dapat menjadi jaminan pendapatan yang diterimanya semakin baik, dan dengan pendapatan yang semakin baik, maka tingkat hidup dan

kesejahteraan pun akan semakin baik.

Selanjutnya Fatah (2006) menyatakan ragam pendidikan ada tiga, yaitu: 1) pendidikan informal, 2) pendidikan non formal dan pendidikan formal. Menurut Jaelani (2010) pendidikan non formal adalah salah satu jenis pendidikan yang dilakukan di luar ujian formal. Pendidikan non formal ini digunakan Pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Dalam Wikipedia.org dijelaskan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Menurut Bappenas (2010) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab. Salah satu penyebabnya berupa: sumberdaya manusia, pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan

tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

Berdasarkan evaluasi pembangunan daerah tertinggal, yang dilakukan KPDT bersama Bappenas, pada tahun 2004 diketahui secara nasional dari 199 kabupaten tertinggal yang masuk dalam kategori sangat parah (9 kabupaten), sangat tertinggal (50 kabupaten), tertinggal (54 kabupaten), agak tertinggal (88 kabupaten). Kemudian pada tahun 2007 diketahui bahwa kategori sangat parah (11 kabupaten), sangat tertinggal (50 kabupaten), tertinggal (53 kabupaten), agak tertinggal (57 kabupaten) serta didapatkan hasil bahwa terdapat 28 kabupaten yang sudah dapat keluar dari kategori tertinggal.

Untuk Propinsi Bengkulu, menurut Husni, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (2009), sebanyak

800 dari 1.300 desa di Provinsi Bengkulu masih tertinggal. Desa tertinggal itu tersebar di sembilan

Kaur. Salah satu daerah yang masih memiliki daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kecamatan Kota Arga Makmur.

Kecamatan Kota Arga Makmur merupakan daerah ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara, dimana terdapat pusat pemerintahan daerah dan juga menjadi pusat perekonomian daerah ini, yang memiliki 24 desa. Namun demikian, berdasar data Bappeda Bengkulu Utara tahun 2009, 6 desa yang ada di Kecamatan Kota Arga Makmur diantaranya merupakan desa tertinggal. Desa-desanya tersebut adalah: Desa Pagar Ruyung, Desa Pematang Sapang, Desa Pagar Banyu, Desa Air merah dan Desa Talang Denau dan Desa Senali.

Berdasarkan hasil survey Bappeda Bengkulu Utara tahun 2009, kondisi SDM desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur, sebagai berikut: diketahui jumlah penduduk di desa tertinggal bervariasi, mulai 254 orang (Desa

kabupaten, namun yang paling banyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Pagar Ruyung) hingga 1144 orang (Desa Senali). Jumlah penduduk yang menganggur di setiap desa tertinggal sangat sedikit, tidak sampai 2% untuk masing-masing desa. Hampir semua penduduk bekerja, bahkan di Desa Pagaruyung tidak ada penduduk menganggur, semua bekerja kecuali yang sekolah. Namun demikian pada semua desa tertinggal terdapat penduduk yang tidak pernah sekolah dengan jumlah yang cukup banyak dan penduduk buta huruf.

Hasil survey Bappeda Bengkulu Utara tahun 2009 juga menunjukkan tingkat pendidikan penduduk sangat rendah, sarjana tidak sampai 0,5% dari jumlah penduduk, SLTA sederajat hanya sekitar 1% dari jumlah penduduk, hanya Desa Pagar Ruyung yang memiliki penduduk tamat SLTA mencapai 10%. Jumlah penduduk yang putus sekolah, mencapai 5%, hampir 10 % dari jumlah penduduk desa tertinggal di Kecamatan Kota

Argamakmur tidak sekolah dan/atau buta huruf. Penduduk yang sekolahpun tidak mencapai 10% dari jumlah penduduk, kecuali Desa Senali yang memiliki 26 % anak yang sekolah Selanjutnya ditinjau dari tingkat kesehatan masyarakat, mereka memiliki kesehatan yang

baik (kecuali Desa Pagar Ruyung yang memiliki balita gizi buruk dan balita kurang gizi), dan angka harapan hidup tinggi. Selengkapnya data SDM desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kondisi Sumber Daya Manusia di Desa-desa Tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur

No	Uraian	Desa Pagar Ruyung	Desa Pematang Sapang	Desa Pagar Banyu	Desa Air Merah	Desa Talang Denau	Desa Senali
I.	Kondisi Penduduk						
	Jumlah Penduduk (orang)	256	1020	988	1025	325	1144
	Laki-laki (orang)	136	460	520	400	175	577
	Perempuan (orang)	120	560	468	625	150	567
	Jumlah KK (KK)	74	262	257	285	150	300
	Jumlah Rumah Tinggal	54	232	250	185	77	264
	Jumlah Penerima BLT (KK)	27	162	97	59	25	118
	Jumlah Penerima Raskin (KK)	50	162	97	59	39	118
	Jumlah KK Miskin	74	162	97	59	39	172
	Jumlah Penghasilan KK perbulan (Ribuan Rp)	500	400	600	600	400	500
II.	Tenaga Kerja						
	Jumlah Penduduk Usia 15-60 Tahun (orang)	85	22	679	755	200	488
	Jumlah Ibu Rumah Tangga (orang)	65	262	257	350	100	300
	Penduduk Masih Sekolah (orang)	45	135	50	250	75	360
	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	211	400	729	760	325	288
	Jumlah Penduduk yang Menganggur atau Sedang Mencari Pekerjaan (orang)	-	10	15	12	6	16

III.	Mata Pencarian Pokok						
	Petani (orang)		262	700	755	325	230
	Pedagang (orang)	10	3	10	10	1	10
	Nelayan (orang)	-	-	-	-	-	-
	Buruh Tani (orang)	20	10	3	15	10	100
	Pegawai (orang)	10	2	3	21	3	2
IV	Tingkat Pendidikan						
	S1 (orang)	1	-	4	1	-	1
	D1, D2, D3 (orang)	6	-	5	2	-	2
	SLTA/ sederajat (orang)	25	10	15	10	5	15
	SLTP/ sederajat (orang)	5	-	20	15	5	25
	Tamat SD/ sederajat (orang)	40	10	100	50	7	80
	Pernah Sekolah SD tetapi Tidak Tamat (orang)	13	5	25	25	10	165
	Pernah Sekolah SMP tetapi Tidak Tamat (orang)	9	-	15	10	5	40
	Pernah Sekolah SMA tetapi Tidak Tamat (orang)	7	5	6	2	2	20
	Pernah Kuliah S1 tetapi Tidak Tamat (orang)	-	-	-	-	-	2
	Usia 7-45 tahun Tidak Pernah Sekolah (orang)	9	400	500	30	25	150
	Buta Huruf (orang)	10	55	10	30	25	85
	Belum sekolah (orang)	30	408	70	40	20	125
	Penduduk masih sekolah (orang)	25	25	80	30	15	300
V	Harapan Hidup						
	Bayi hidup dari 10 kelahiran (orang)	6	10	10	6	10	9
	Ibu meninggal dari 10 kelahiran (orang)	0	0	0	0	-	-
	Anak usia 5 tahun yang meninggal Dalam setahun (orang)	-	1	-	1	1	1
	Jumlah balita diimunisasi dalam sebulan (orang)	6	15	25	25	20	20
	Jumlah balita dengan status gizi buruk (orang)	2	-	-	-	-	-
	Jumlah anak balita kurang gizi (orang)	5	-	-	-	1	4
	Usia tertinggi yang diharapkan (orang)	75-84	85	70-90	70-85	70-80	70-85
	Usia terendah yang diharapkan (orang)	75	75	25	25	65	75

Sumber: Bapeda Bengkulu Utara, 2009.

Berdasarkan tabel 1 diatas, kondisi penduduk desa tertinggal di

Kecamatan Kota Arga Makmur dilihat dari segi pendidikan masih

rendah, karena banyak didominasi oleh penduduk yang tamat Sekolah Dasar dan tidak pernah sekolah. Namun demikian, penduduk memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik, yang tercermin dari tingkat kelahiran hidup dan angka harapan hidup

Berdasarkan hal yang telah disampaikan diatas, penduduk di 6 desa tertinggal Kecamatan Kota Arga Makmur mengalami kondisi SDM yang rendah jika dilihat dari

tingkat pendidikannya. Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut. Salah satu upaya adalahh dengann mengadakan pendidikan non formal di desa-desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pendidikan non formal dapat menjadi solusi bagi peningkatan SDM di desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan Non Formal

Menurut Hartoto (2008) pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Pendidikan nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal,

nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga sub-sistem tersebut berperan.

Suharsaputra (2009) menyatakan kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering

memaksa manusia untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Selanjutnya Suharsaputra (2008) menjelaskan bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi, pendidikan luar sekolah berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya

kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

Dalam hubungan ini pendidikan termasuk pendidikan nonformal yang berbasis kepentingan masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, agar keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya pembangunan di masyarakatnya. Ini berarti bahwa pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam penyelenggaraan program pendidikannya.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui Pendidikan nonformal berbasis

masyarakat, yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam wikipedia.org dinyatakan pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di setiap mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Program-program Pendidikan Non Formal, yaitu Keaksaraan fungsional (KF); Pendidikan Kesetaraan A, B, C; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Magang; dan sebagainya Lembaga PNF yaitu PKBM, SKB, BPPNFI, dan lain sebagainya.

2. Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat

Suharsaputra (2008) menyatakan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui

pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

a. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Suharsaputra (2008) menjelaskan pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Pendidikan dari masyarakat artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai

subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk merdesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Dalam UU Sisdiknas No 20/2003 pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat disebutkan sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
 2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku.
 4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- b. Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat

Model pendidikan berbasis masyarakat untuk konteks Indonesia kini semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7. jalur yang digunakan bisa formal dan atau nonformal. Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

c) Pinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut Michael W. Galbraith dalam Suharputra (2008) pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- *Self determination* (menentukan sendiri).
- *Self help* (menolong diri sendiri)
- *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan)
- Localization* (lokalisasi)
- *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan)
- *Reduce duplication of service.*
- *Accept diversity* (menerima perbedaan)
- *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan)

- *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup)

3. Sumber Daya Manusia

Di dalam wikipedia.org dijelaskan sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*.

Mustapa (2002) menjelaskan dalam indikator kualitas Sumber Daya Manusia Daerah, terdapat lima sub-indikator, yaitu : karakteristik penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, serta perilaku dan nilai

sosial masyarakat. Dari ke lima sub indikator ini ternyata sub indikator pendidikan memberikan sumbangan terbesar.

4. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan) (Saefudin 2009).

M. Yudhie (2009), secara substansi makna daerah tertinggal adalah daerah yang tidak sanggup secara ekonomi, SDM, dan infrastruktur yang berdiri sendiri sebagai daerah otonom dan tidak mampu membangun demi terciptanya kemandirian daerah tersebut. Sedang menurut Bappenas (2000), desa tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang *masyarakat* serta *wilayahnya* relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Kategori Desa tertinggal

Desa tertinggal dapat dikategorikan berdasarkan kondisi desa-desa tertinggal yang dapat dilihat berdasarkan kondisi fisik sarana dan prasarana, maupun kondisi manusianya.

A. Kondisi Fisik Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal

Desa tertinggal berdasar fisik sarana dan prasarana dapat dimulai dengan mempelajari kriteria, variabel, parameter atau indikator dan skoring yang menentukan kondisi desa tersebut. Ada beberapa pendapat yang memberikan kontribusi untuk menentukan kondisi desa berdasar fasilitas sarana dan prasarana, antara lain: Saefudin (2005), yang menyusun Panduan Teknis Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-pulau Kecil, BPS (2005) dan Agusta (2008). Saefudin (2005), kemudian mengelompokkan tipologi untuk Desa Tertinggal berdasarkan pada kriteria

penilaian desa tertinggal adalah sebagai berikut:

1. Type A (*Kawasan yang Prasarana Dasar Wilayahnya Tertinggal*)
Kawasan perdesaan yang ketersediaan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang
2. Type B (*Kawasan yang Sarana Wilayahnya Tertinggal*)
Kawasan perdesaan yang ketersediaan Prasarana Dasar Wilayahnya tercukupi, Namun Ketersediaan Sarana Wilayahnya kurang.
3. Type C (*Kawasan yang Kehidupan Masyarakatnya Tertinggal*)
Kawasan perdesaan yang Ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya tercukupi, namun kehidupan masyarakatnya rendah
BPS (2005), menyatakan bahwa penduduk miskin masih berkantong di desa-desa. Kenyataan tersebut hendaknya

menjadi acuan bahwa penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk lokasi di wilayah perdesaan, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan memerlukan perhatian, fasilitasi serta dukungan khusus. Salah satunya melalui program penanggulangan kemiskinan.

Untuk urusan infrastruktur pembangunan dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan jajarannya di daerah sesuai kebutuhan setempat. Infrastruktur yang dibangun difokuskan pada pengembangan jaringan yang menumbuhkan dampak ekonomi yang luas agar penduduk lebih mudah mengembangkan ekonomi daerahnya. Dikembangkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan mengangkat kesejahteraan rakyat secara umum.

Disamping itu pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk pengadaan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal Menteri memunculkan gagasan untuk memadukan upaya memperkecil kesenjangan fisik daerah tertinggal dengan daerah lainnya, upaya pembangunan manusia atas dasar sasaran dan target MDGs menjadi pilihan yang menarik .

Gagasan keterpaduan pembangunan manusia dengan prioritas pengentasan kemiskinan sangat sejalan dengan upaya pengurangan kesenjangan fisik dan prasarana yang sangat minim.

B.Kondisi SDM di Desa Tertinggal

Zaini (2010) menyatakan masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah. Selanjutnya Kwik (2003) menyatakan Indonesia selama tiga dekade terakhir mencatat berbagai kemajuan dalam pembangunan

sumber daya manusia (SDM) dengan adanya indikasi membaiknya berbagai indikator SDM sejak 1960 hingga 1999.

Menurut Kwik (2003) berbagai perbaikan indikator SDM dari 1960 hingga 1999, antara lain ditunjukkan dengan usia harapan hidup rata-rata meningkat dari 41,0 tahun menjadi 66,2 tahun. Selain itu, juga angka kematian bayi turun dari 159 menjadi 48 per 1.000 kelahiran hidup, serta angka buta huruf dewasa turun, menurun dari 61% menjadi 12%. Namun, berbagai indikator SDM Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Hal ini terlihat antara lain dari rendahnya peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan Human Development Report 2003,

peringkat human development index (HDI) Indonesia menempati urutan 112 dari 175 negara. Selain itu, jika dipilih menurut jenis kelamin, dengan menggunakan nilai indeks pembangunan gender (IPG), Indonesia menempati urutan ke-91 dari 155 negara. Kwik menambahkan, Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi melambatnya pencapaian indikator-indikator di bidang pembangunan SDM, antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial politik serta ketahanan dan keamanan yang kurang menguntungkan. Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Seman Widjojo (2003) mengatakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut akibat pembangunan Indonesia hanya berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi mengesampingkan perbaikan kualitas manusia,

sehingga hal tersebut akan menimbulkan berbagai problema sosial dan kesenjangan. Kwik dan Seman (2003) mengatakan bahwa perlu adanya upaya pembangunan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah Daerah perlu mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap upaya tersebut, bahkan sejak usia dini di daerah.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan kepada suatu pertimbangan bahwa dengan jenis ini diharapkan akan mendapatkan penjelasan secara akurat berdasarkan fakta yang ada mengenai objek penelitian yang diamati.

Menurut Hasan (2002: 22) metode deskriptif digunakan untuk

melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan pendidikan non formal solusi untuk meningkatkan SDM di daerah tertinggal Kecamatan Kota Arga Makmur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data di peroleh dari Bappeda Bengkulu Utara dan dinas/terkait lainnya. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan: 1) Riset kepustakaan (*library research*); dan 2) Metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dengan membuat tabulasi data dan kemudian dianalisa sesuai dengan keperluan selanjutnya.

PROFIL DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KOTA ARGAMAKMUR

Desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Argamakmur memiliki batas wilayah seperti yang terdapat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Tertinggal di Kecamatan Kota Argamakmur

Batas	Desa Pagar Ruyung	Desa Pematang Sapang	Desa Pagar Banyu	Desa Air Merah	Desa Talang Denau	Desa Senali
Sebelah Timur	Ds Gn Besar	Ds Kt Lekat	Desa Ptg Sapang	Desa Pagar Ruyung	Desa Air Merah	Hutan Lindung
Sebelah Barat	Desa Air Merah	Desa Sumber Agung	Desa Dusun Curup	Desa Kalai Duai	Desa Gunung Selan	Desa Karang Anyar I
Sebelah Utara	Desa Rama Agung	Desa Sumber Agung	Desa Sumber Agung	Desa Talang Denau/ Desa Rama Agung	Desa Rama Agung	Desa Taba Tembilang
Sebelah Selatan	Desa Sbr Agung	Desa Pagar Banyu	Sungai Jelatang	Desa Kalai Duai	Desa Tjg Karet	Ds Kuro Tidur

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara 2009.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Argamakmur sebagian berbatasan dengan desa tertinggal juga, dan tidak ada yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Gunung Alam. Desa tertinggal kebanyakan berbatasan dengan desa pada kecamatan lain, dan satu desa berbatasan dengan hutan lindung.

Wilayah desa tertinggal di Kecamatan Kota Argamakmur cukup luas, terutama Desa Pagar Ruyung yang memiliki 10.000 ha lahan dan 8.500 ha merupakan lahan perkebunan dan 1500 ha sawah. Desa lain juga memiliki lahan perkebunan, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Sumberdaya Alam Desa Tertinggal di Kecamatan Arga Makmur

No	Uraian	Desa Pagar Ruyung	Desa Pematang Sapang	Desa Pagar Banyu	Desa Air Merah	Desa Talang Denau	Desa Senali
I.	Jumlah Luas Lahan/wilayah (ha)	10.000	415	900	600	208	2150
	Tanah sawah (ha)	1500	50	25	1	20	150
	Tanah Kering (ha)	-	-	600	50	-	350
	Kolam/Tambak (ha)	15	3,5	-	1,5	-	20
	Sungai/danau (ha)	47	10	5	1	-	0,5
	Tanah Perkebunan (ha)	8.350	238	-	300	60	1000
	tdd:						
	Kebun Karet (ha)	8.000	85	250	75	50	150
	Kebun Sawit (ha)	100	-	3	1	-	50
	Kebun Kopi (ha)	150	10	4	35	75	300
	Kebun Kakao (ha)	-	-	-	-	-	-
	Lahan Pemukiman (ha)	3	4	5	60	30	130
II.	Peternakan (ekor)						
	Kerbau	-	-	-	4	-	4
	Sapi	40	20	15	3	20	5
	Kambing	30	15	10	30	150	15
	Ayam	510	50	200	150	250	200
	Bebek	65	-	-	20	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara 2009.

Masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur banyak yang memelihara ayam, sapi dan kambing sebagai sumber penghasilan tambahan. Seluruh desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur memiliki potensi pertanian dan perkebunan, sebagian desa juga

memiliki potensi peternakan dan perikanan. Peran Pemda dalam pengelolaan sumberdaya alam masih sebatas penyuluhan/sosialisasi dan partisipasi masyarakat ikut bekerja pada proyek-proyek pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemda.

Pendidikan Non Formal Solusi untuk Meningkatkan SDM di Daerah Tertinggal Kecamatan Kota Arga Makmur

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi SDM di desa-desa tertinggal

Kecamatan Kota Arga Makmur, dilihat dari jenjang pendidikan, maka

pendidikan masyarakat sangat rendah, karena mayoritas penduduk hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Angka buta huruf juga sangat tinggi, terindikasi lebih dari 4.5% penduduk buta huruf. Rata-rata penduduk memiliki masa sekolah (lamanya waktu sekolah), selama 9 tahun (jauh dibawah lama maksimal pendidikan berdasar UNDP selama 15 tahun), hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa. Sedangkan pendidikan informal maupun nonformal sebagai penunjang pendidikan dasar tidak tersedia. Tidak terdapat Sekolah TK maupun TPQ.

Di semua desa tertinggal memiliki prasarana Sekolah Dasar, tetapi tidak ada satupun desa yang memiliki sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Prasarana SLTA dan SLTP berada di dekat Kantor Kecamatan, atau Desa lain dimana jarak desa ke kota yang memiliki Sekolah Lanjutan Pertama lebih dari 5 km. Terbatasnya Sekolah Menengah, Sekolah Lanjutan tingkat Pertama maupun terbatasnya fasilitas

TK, TPQ, pendidikan nonformal, informal, dan terbatasnya jumlah guru menunjukkan terbatasnya akses pendidikan dan rendahnya mutu layanan pendidikan di desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur.

Seperti yang telah dikemukakan di depan, masyarakat miskin memerlukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar. Banyak kegiatan yang secara turun temurun telah diselenggarakan oleh masyarakat di desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur, seperti: kumpulan pengajian, kumpulan kematian, gotong royong, kelompok tani dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terbuka untuk segala usia, strata sosial dan jenis kelamin.

Suparlan (2008) menjelaskan kita mengenal dua paradigma pembangunan nasional. Pertama, paradigma pembangunan fisik-

ekonomi. Kedua, paradigma pembangunan manusia, yang beorientasi kepada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dikaitkan dengan pembangunan daerah tertinggal, introduksi titik masuk (*entry point*) dimulai dari aspek pendidikan untuk memperbaiki paradigma pembangunan sumber daya manusia. Memang benar, bahwa aspek-aspek sandang pangan dan papan menjadi fokus kebutuhan rakyat di daerah tertinggal sekarang (inti teori Abraham Maslow tentang kebutuhan primer). Tetapi, program pemenuhan kebutuhan primer bagi masyarakat tidak akan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan tanpa dibarengi dengan proses peningkatan kapasitas SDM yang mantap, termasuk pemenuhan akses pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia, khususnya karena manusia adalah sebagai mahluk pembelajar. Tiga pilar pembangunan pendidikan di daerah tertinggal dan khusus, meliputi (1) peningkatan akses memperoleh pendidikan, (2) peningkatan mutu dan daya saing,

serta (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tidak ada pendidikan tidak akan terjadi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat atau sekali lagi "*no education, no social-economic development*".

Bila dilihat dari beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah di wilayah desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masih berupa kegiatan pembangunan fisik ekonomi masyarakat, belum ada program dan kegiatan yang secara langsung mencerminkan pembangunan sumberdaya manusia. Meskipun melalui kegiatan ini masyarakat belajar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selengkapny data program dan kegiatan pembangunan di desa-desa tertinggal dapat di lihat pada tabel 4 dii bawah ini

Tabel 4. Program Pembangunan Pemerintah di Desa Tertinggal Kecamatan Kota Arga Makmur

No	Nama Desa	Nama Program (Tahun)	Sasaran	Dana (Rp)	Manfaat
1.	Desa Pagar Ruyung	P2KP (2007)	Masyarakat Miskin	200 jt	Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun desa dan turut serta dalam menentukan pembangunan desa;
2.	Desa Pematang Sapang	Pengembangan Bibit Karet (2008) 1. P2KP (2007-2008) 2. BLT 3. Raskin			
3.	Desa Pagar Banyu	1. Pembangunan Kantor Desa (2007) 2. Perehaban PUSTU (2008) 3. P2KP (2006) 4. KUBE (2006)	Pemenuhan kebutuhan prasarana desa Masyarakat	APBD APBD 10 jt	1. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun desa dan turut serta dalam menentukan pembangunan desa; 2. Kelembagaan masyarakat di desa seperti LMD, memiliki peran besar dalam menentukan pembangunan untuk desa;
4.	Desa Air Merah	Pembangunan jalan desa P2SEDT	Pemenuhan kebutuhan prasarana desa	APBD 35 jt	
5.	Talang Denau	1. P2KP (2007) 2. PDT - ternak Kambing - sapi 20 ekor	Jalan usaha tani	25 jt	
6	Desa Senali	Bantuan Perkebunan 15 ha (2008) 1. P2KP (2007) 2. BBM (2007) 3. BLT (2008) 4. Raskin (2008)	Masyarakat Miskin Penanggula ngan Kemiskinan Rumah	300 jt	

		5. Dana Recovery (2008)	Tangga Miskin 120 KK Rumah Tangga Miskin 118 KK Rumah Tangga Miskin 118 KK Perbaikan Rumah Akibat Gempa 12 KSMP		
--	--	----------------------------	--	--	--

Sumber: Bappeda Bengkulu Utara, 2009.

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas, pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur adalah; bantuan perkebunan, BLT, Raskin, bantuan ternak, bantuan perbaikan ekonomi serta pembangunan, perehaban prasarana kantor desa serta pembangunan jalan usaha tani. Namun telah disampaikan dimuka, tanpa pembangunan sumberdaya manusianya, pembangunan-pembangunan yang telah ada menjadi kurang optimal. Hal ini disebabkan biasanya bantuan-bantuan yang ada bersifat temporer dan menunggu anggaran Pemerintah berjalan. Kemudian banyak terjadi

masyarakat aktif kegiatan selama anggaran ada dan sebaliknya habis bantuan, habis pula kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjadikan bantuan yang telah ada menghasilkan nilai yang optimal, jiwa masyarakat yang ada di desa tertinggal juga perlu di bangun melalui pendidikan. Model pendidikan yang perlu dilaksanakan adalah pendidikan yang berorientasi dengan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang ada. Pembangunan melalui program P2KP dilaksanakan berdasarkan keputusan masyarakat setempat. Untuk itu masyarakat perlu diajarkan untuk bagaimana mengambil keputusan yang baik berdasar kepada

pemenuhan skala prioritas kebutuhan. Hal ini misalnya dapat dijadikan bahan atau topik dalam pertemuan-pertemuan masyarakat pada kegiatan keagamaan, dibicarakan dalam kelompok-kelompok tani, sehingga keputusan yang diambil memang merupakan keputusan bersama dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Begitu pula dengan kegiatan pembangunan prasarana kesehatan Puskesmas, masyarakat dapat diajarkan untuk menjaga kesehatan dengan memanfaatkan Puskesmas. Masyarakat dapat belajar menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang di derita. Masyarakat dapat juga diikutsertakan dalam program-program keterampilan untuk menjalankan program bantuan ekonomi seperti: KUBE, dan guna memanfaatkan bantuan BLT. Sehingga program dan kegiatan

pembangunan yang ada tidak menjadi sia-sia, karena masyarakat telah siap untuk menjalankannya. Dengan demikian diharapkan masyarakat di desa-desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur, tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatan pada lahan pertanian tetapi juga pada keterampilan yang dimiliki.

Semua pendidikan tersebut dapat diikuti oleh semua penduduk dari berbagai usia, jenis kelamin dan strata sosial yang ada pada masyarakat desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur melalui pendidikan yang diselenggarakan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat baik langsung maupun tak langsung atau lebih dikenal dengan pendidikan non formal. Tentunya bantuan pembinaan serta perhatian dari Pemerintah baik pusat maupun daerah tetap dibutuhkan.

PENUTUP

Banyak pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa tertinggal di Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan pembangunan adalah untuk memajukan desa-desa tersebut agar setara dengan desa-desa maju lainnya baik seperti desa maju di Propinsi Bengkulu maupun propinsi lainnya. Pembangunan yang dilakukan seluruhnya bersifat fisik atau materiil dan sedikit sekali yang bersifat non fisik atau immateril. Padahal untuk memajukan desa-desa tertinggal tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik saja. Pembangunan fisik menjadikan masyarakat tidak kreatif, kurang mandiri dan selalu mengharapkan bantuan pemerintah.

Untuk menghasilkan masyarakat yang mandiri, pembangunan dilaksanakan sebaiknya tidak hanya bersifat fisik saja tapi juga bersifat

non fisik, seperti penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan program-program usaha rakyat yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal. Serta menggiatkan kembali jalur pendidikan non formal yang telah ada di masing-masing desa. Karena pendidikan nonformal sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mampu menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika masyarakat memiliki usaha yang mandiri, memiliki sentra-sentra usaha kecil yang maju, maka untuk melengkapi sarana fisik dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Jika masyarakat memiliki usaha lain dan tidak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian saja, dan mereka dapat mengembangkan usahanya pada usaha-usaha produktif lainnya, maka kesejahteraan rakyat lebih cepat dapat ditingkatkan dan desa-desa tertinggal dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Bengkulu Utara, 2009. *Evaluasi Desa-desa Tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara*.
- Bappenas, 2010. *Sub Direktorat Daerah Tertinggal Definisi Daerah tertinggal dan Faktor Penyebab Daerah Tertinggal*.
<http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?...> Akses: 10 Juni 2010.
- Fatah, Luthfi, 2006. *Dinamika pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Jurusan Sosek FP Universitas Lambung Mangkurat dengan Pustaka Banua: Banjarbaru Kalsel.
- Hasan, Iqbal, 2002. *Metode Penelitian*. Penerbit Erlangga Jakarta:.
- Jaelani, 2010. *Pendidikan Non Formal*.
<http://jaelani.student.umm.ac.id/2010/01...> Akses: 1 Juni 2010.
- Mustafa, Hasan, 2002. *SDM dan Otonomi Daerah*.
<http://home.unpar.ac.id/~hasan/SDM%20DAN...>
- Suharsaputra, Uhar, 2009. *Pendidikan Nonformal*.
<http://uharsputra.wordpress.com/pendidik...> Akses: 10 Juni 2010.
- Hartoto, 2008. *Pengertian dan Unsur-Unsur Pendidikan*.
<http://fatamorghana.wordpress.com/2008/0...>
- Suparlan, 2008. *Komite Sekolah Dan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Artikel
<http://www.suparlan.com/pages/posts/komi...>
- Wikipedia, 2010. *Sumber Daya Manusia*
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya... Akses: 10 Juni 2010.